



PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERKUALITAS

Stephanus Turibius Rahmat ✉

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan, Cimahi , Indonesia

Info Artikel

Diterima Agustus 2018
Disetujui Oktober 2018
Dipublikasikan Desember
2018

Keywords:
Education; equitable; quality

Abstrak

Equitable and quality education is determined by the quality and competence of educators in the family (informal education), school (formal education), and community (non-formal education) environment. Educators in three levels play a role and participate to provide quality education. In addition, educators are responsible for advancing education in all dimensions. It means that we all should have the same commitment to improve the quality of national education in this country. We all have the same vision and mission to make education in Indonesia more equitable and quality. Celebration of National Education Day which is celebrated every year will be able to inflame our spirit and struggle to accelerate the equitable and quality education.

Abstrak

Pendidikan yang merata dan berkualitas ditentukan oleh kualitas dan kompetensi pendidik dalam lingkungan keluarga (pendidikan informal), sekolah (pendidikan formal) dan masyarakat (pendidikan non-formal). Pendidik dalam ketiga level ini berperan dan berpartisipasi untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pendidik bertanggungjawab untuk memajukan pendidikan dalam segala dimensinya. Itu berarti bahwa kita semua harus memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Nasional di negeri ini. Kita mempunyai visi yang satu dan sama yakni menjadikan pendidikan di Indonesia semakin merata dan berkualitas. Perayaan Hari Pendidikan Nasional yang dirayakan setiap tahun kiranya mampu menggelorakan komitmen dan panggilan hati seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas.

PENDAHULUAN

Bulan Mei adalah momen refleksi terkait pendidikan. Pada momen tersebut kita merayakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Momentum Hardiknas bukan hanya sebuah memori untuk mengenang suatu peristiwa sejarah, tetapi menjadi kesempatan untuk melakukan introspeksi diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, introspeksi berarti peninjauan atau koreksi terhadap (perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan sebagainya) diri sendiri, mawas diri (KBBI Pusat Bahasa, 2011:545). Dalam konteks inilah, maka perayaan Hardiknas sebagai kesempatan untuk mengintrospeksi diri bagi setiap insan pendidikan. Setiap pemangku kepentingan yang mempunyai visi dan misi bersama dalam pendidikan perlu meretrospeksi diri dan mengkritik diri sendiri, memperbaiki setiap bentuk perbuatan, sikap, kelemahan dan kesalahan yang turut membuat pendidikan kita tidak merata dan tidak berkualitas. Selain itu, kita perlu melakukan proyeksi atau membangun suatu tekad guna menciptakan pendidikan yang merata dan berkualitas. Atas dasar itulah, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 21046/MPK/TU/2017 tentang pedoman peringatan Hardiknas 2017 dengan menetapkan tema “Percepat Pendidikan yang merata dan berkualitas” (<https://www.kemdikbud.go.id>). Tema ini sangat urgen dan strategis untuk menyalakan api semangat kita dalam mewujudkan cita-cita kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan itu, ada suatu kemauan bersama untuk memperbaiki model pendidikan yang merata dan berkualitas. Perayaan Hardiknas bertujuan untuk memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan akan penting dan strategisnya pendidikan bagi peradapan dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, Hardiknas tidak semata-mata bertujuan untuk mengenang hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara sebagai Bapak Perintis Pendidikan Nasional, tetapi sebuah momentum bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menumbuhkan kembali rasa nasionalisme dan patriotisme pada pendidikan. Dengan merayakan Hardiknas, kita diajak untuk menghidupkan kembali filosofi perjuangan Ki Hadjar Dewantara dalam meletakkan dasar dan arah pendidikan bangsa Indonesia yakni pendidikan yang berdimensi liberatif atau membebaskan.

KAJIAN TEORI DAN PEMABAHASAN

Realitas Keteringgalan Pendidikan

Suatu bangsa akan maju jika pendidikannya baik, merata, dan berkualitas. Sesuatu yang berkualitas hanya dicapai melalui pengorbanan

dan usaha yang besar. Begitupun halnya dengan pendidikan yang bermutu hanya diperoleh dengan usaha dan dana yang sangat besar. Sebaliknya, suatu bangsa akan hancur jika pendidikannya buruk. Pendidikan yang berkualitas justru melahirkan generasi muda yang bertanggung jawab terhadap negara. Negara-negara yang besar dan maju di dunia saat ini justru karena keberhasilannya menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi warganya. Pendidikan yang berkualitas mampu membentuk manusia yang cerdas dan unggul serta memiliki motivasi tinggi untuk berkontribusi demi kemajuan bangsa.

Negara kita saat ini sedang mengalami ketertinggalan dalam kualitas pendidikan baik formal maupun informal. Hal ini diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia (<http://www.kompasiana.com/evaprian-ka>). Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2015), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Hasil survey dari lembaga yang sama menunjukkan bahwa Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Hal ini dapat dijadikan indikator masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2013) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia, ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). SMP di Indonesia berjumlah 20.918 dan ternyata hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP). Sedangkan SMA berjumlah 8.036 dan ternyata hanya tujuh sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Selain itu, ketika pada tahun 2015 bertepatan dengan saat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, peringkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia berada pada urutan 110 dari 188 negara. Pada saat ini posisi kita turun ke peringkat 113 (Harian Umum Flores Pos, 26 April 2017). Persoalan lain yang berkaitan erat dengan dunia pendidikan kita adalah rendahnya kualitas guru, minimnya partisipasi belajar karena masyarakat kurang menyadari pentingnya pendidikan dan faktor letak geografis yang menyulitkan akses pendidikan, masyarakat tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai pendidikan

yang sangat mahal, kurang memadainya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pendidikan, tidak meratanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan masalah-masalah lainnya. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Akan tetapi, dana juga tidak akan membantu jika kualitas para pendidik di sekolah tidak representatif. Program sertifikasi bagi para guru pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru. Namun, terkadang sertifikasi hanya menjadi formalitas untuk mendapatkan tambahan finansial di tengah minimnya gaji guru. Tidak mengherankan jika para guru berlomba-lomba mengejar program sertifikasi. Akibatnya, para guru tidak lagi menyadari substansi sebenarnya program sertifikasi yakni sebagai upaya pemerintah untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, andal, cakap, terampil, berkompeten, menyenangkan, dan siap pakai. Bertolak dari semua persoalan ini, maka jelas bahwa tampaknya kita tidak berubah dan tidak berupaya mengejar ketertinggalan kita, sementara negara lain terus berbenah diri. Kita harus mengakui bahwa pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia supaya mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara yang lain.

Berhadapan dengan realitas ketertinggalan pendidikan ini, kita semua pasti bertanya kemanakah anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN? Apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam melaksanakan amanat UU Sisdiknas Tahun 2003 dan UUD 1945? Kita tidak dapat menyalahkan pemerintah sepenuhnya. Pemerintah telah berusaha melaksanakan amanat UU Sisdiknas Tahun 2003 dan UUD 1945, namun dalam penerapan visi dan misi Pendidikan Nasional masih terdapat hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah sangat memperhatikan pendidikan melalui Departemen Pendidikan Nasional. Pemerintah yakin mampu mewujudkan visinya yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, produktif dan berahlak mulia. Apalagi visi tersebut diimplementasikan ke dalam misi-misi yang sangat optimis, yaitu (1) Menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar; (2) Mewujudkan sistem pendidikan efektif, efisien, dan bertanggung jawab; (3) Mewujudkan pendidikan nasional yang merata dan berkualitas. Dengan itu, kita masih mempunyai secercah harapan bahwa pada suatu saat pendidikan kita pasti merata dan berkualitas.

Pendidikan Merata dan Berkualitas

Pendidikan yang merata dan berkualitas merupakan ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD 1945. Atas dasar itulah, maka Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan batasan ini, Bab II Pasal 3 UU Sisdiknas merumuskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pelaksanaan Pendidikan Nasional bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Semua insan pendidikan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha/industri, warga sekolah, LSM dan seluruh stakeholder) mempunyai tanggungjawab yang sama untuk menciptakan Pendidikan Nasional yang merata dan berkualitas. Warga masyarakat memiliki peranan yang amat penting dalam pelaksanaan Pendidikan Nasional. Masyarakat dapat berperan sebagai subjek atau pelaku pendidikan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, maka negara tidak akan berkembang. Akibatnya kita akan tergantung pada orang atau negara lain yang jauh lebih berkembang. Masyarakat dapat melahirkan anak-anak sebagai generasi baru bangsa. Pendidikan adalah usaha orang tua atau generasi tua untuk mempersiapkan anak atau generasi muda supaya kelak dapat hidup secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara baik. Pendidikan mempunyai sasaran utama yakni anak-anak sebagai generasi muda bangsa yang akan menjadi tonggak tengah penopang kehidupan bangsa di masa depan.

Realitas ketertinggalan dalam dunia pendidikan kita memang sesuatu yang tidak terbantahkan. Kenyataan ini seharusnya mendorong pihak-pihak terkait untuk membuat sebuah rekonstruksi atau politik pendidikan yang mengarah pada pencapaian kualitas pendidikan yang hakiki. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus

terus direkonstruksi, tidak hanya pada masalah sistem kebijakan, tapi juga model pendidikan yang lebih progresif, kreatif, dan profesional. Ada beberapa langkah yang ditawarkan supaya dilakukan pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas (<https://id.wikipedia.org/wiki>), yakni :

Pertama, meningkatkan fungsi dan peran sentral Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak hanya sebatas menentukan standar pendidikan dalam sisi penyelenggaraan Ujian Nasional, tetapi melakukan konsolidasi lebih solid dengan pihak-pihak terkait untuk mengontrol kualitas pendidikan di setiap lembaga pendidikan. Pengukuran standar pendidikan juga harus memperhatikan wilayah-wilayah yang akses pendidikan dan kelengkapan sarana pendukung pendidikan masih minim. Jika masalah pemerataan pendidikan yang tidak seimbang antara daerah perkotaan dan pedalaman/pedesaan, maka mestinya konsentrasi pemberdayaan adalah sekolah-sekolah yang ada di wilayah pedalaman/pedesaan.

Kedua, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah proses pendidikan. Kehadiran program pemerintah yakni internet masuk desa diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengakses informasi. Fasilitas ini diharapkan mampu menjadi sarana akses pendidikan bagi peserta didik. Sebab sasaran utama program ini adalah agar peserta didik dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Ketersediaan layanan ini meminimalisasi minimnya akses pendidikan. Selain itu, membantu meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Fasilitas ini juga sebagai sarana untuk mengejar ketertinggalan kita dalam hal akses informasi dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang, seperti negara tetangga Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, dan negara lainnya.

Ketiga, untuk mengentas masalah rendahnya kualitas guru dan kesadaran masyarakat akan pendidikan dapat dilakukan dengan (1) mengadakan kegiatan pelatihan, workshop, seminar, dll untuk memantapkan kualifikasi dan profesionalisme guru yang mengajar di sekolah-sekolah. Berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan, sosok pemimpin pendidikan hendaknya tidak lupa untuk menerapkan konsep “Laku Telu”, atau tiga peran yang dianjurkan Ki Hajar Dewantara secara utuh. Dalam bahasa Jawa, “Ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karso, tut wuri handayani” yang artinya apabila di depan memberi teladan, apabila di tengah memberi ilham atau

inspirasi, dan apabila di belakang memberi dorongan. Ketiga peran tersebut perlu dilaksanakan secara seksama, baik bergantian maupun serempak dalam tampilan sosok pemimpin pendidikan yang utuh; (2) mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Pemerintah perlu mengadakan kegiatan sosialisasi melalui upaya literasi pendidikan bagi masyarakat yang belum mengetahui arti pentingnya pendidikan; (3) pemerintah juga terus melaksanakan beragam kebijakan afirmasi seperti perbaikan dan penyediaan sarana fisik ruang belajar dan gedung sekolah, khususnya yang mengalami kerusakan berat ataupun yang berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Pemerintah melengkapi sarana dan prasarana pendidikan khususnya di daerah yang terpencil. Dengan itu, sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil memiliki sumber belajar yang memadai untuk belajar; (4) melakukan lebih banyak kegiatan pendidikan di daerah terpencil secara gratis. Sebaiknya pengadaan kegiatan pendidikan di lakukan secara gratis, tanpa di pungut biaya apapun; (5) membuat program beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada saat ini telah banyak program beasiswa pendidikan untuk masyarakat seperti beasiswa ekonomi/sosial sampai beasiswa berprestasi. Pemerintah harus melaksanakannya dengan benar dan tepat sasaran. Selain itu, Peningkatan akses pada layanan pendidikan ditempuh dengan perbaikan sistem distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sejak 2015, Program Indonesia Pintar (PIP) telah membantu lebih dari 19 juta anak dari keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia dapat terus bersekolah. Selain membantu meringankan beban personal peserta didik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi wujud komitmen pemerintah dalam upaya penuntasan wajib belajar; (6) tidak mempersulit masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pendidikan dengan membuat sistem administrasi yang sederhana dan mudah di pahami masyarakat. Semua upaya ini akan berdampak positif dan konstruktif jika masyarakat memiliki kemauan baik (political will) untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Keempat, pendidikan yang merata dan berkualitas juga menghendaki supaya pembentukan karakter harus menjadi prioritas. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengajak semua pihak untuk melakukan reformasi pendidikan nasional baik dalam tataran konseptual maupun manajerial. Reformasi bertujuan demi terwujudnya pembangunan pendidikan yang dapat mengantar bangsa dan negara pada kejayaan di masa depan (<https://kominform.go.id/content/detail/9605>).

Dalam tataran konseptual, sekarang sedang diupayakan agar karakter menjadi prioritas dan roh pendidikan nasional. Pembentukan karakter harus menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar. Karakter yang kuat akan menjadi fondasi yang kokoh bagi peserta didik masa kini. Kemudian disempurnakan dengan penguasaan berbagai keterampilan hidup, vokasi dan profesi abad 21. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Gerakan Literasi Nasional (GLN) diharapkan menjadi pintu masuk bergulirnya reformasi pendidikan, baik di lingkungan pusat, maupun di lingkungan pemerintah daerah, satuan pendidikan, bahkan di lingkungan masyarakat dan keluarga (Kemendikbud, 2017:4). Saat ini, Kemendikbud terus mengupayakan penyelarasan, penyatuan, dan pembauran bidang kebudayaan dengan pendidikan. Begitu juga dengan pemanfaatan berbagai sumber-sumber belajar di kelas, lingkungan sekolah, maupun yang ada di luar sekolah. Hal tersebut ditempuh untuk menghadirkan proses pembelajaran yang terbuka, luwes dan memberikan keleluasaan bagi para pelakunya. Pada tahun 2017, Penguatan Pendidikan Karakter tersebar pada 1500 sekolah di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) diharapkan dapat menjadi model penerapan praktik baik PPK bagi sekitarnya. Lima nilai utama karakter yang menjadi prioritas pada PPK, terkait erat dengan berbagai program prioritas Kemendikbud di bidang pendidikan dan kebudayaan. Rencana penguatan peran guru dan kepala sekolah yang saat ini disiapkan Kemendikbud mendorong revitalisasi peran dan fungsi kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator PPK. Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Adapun nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Sedangkan nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat

kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau layanan pada orang-orang yang membutuhkan. Dan nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Dengan terjadinya pembelajaran berbasis penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah diharapkan dapat menghadirkan generasi muda yang berdaya saing dan memiliki karakter positif. Nilai utama karakter PPK tidak hanya menasar para siswa, tetapi juga pada pendidik, dan orang tua sebagai pendidik utama dan pertama. Sinergi antara pelaku pendidikan dan kebudayaan menjadi kunci utama suksesnya pembangunan pendidikan nasional. Reformasi pendidikan merupakan proses panjang dan perlu dilaksanakan secara sistematis, bertahap serta memerlukan partisipasi konstruktif dari semua komponen seperti pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Semua upaya yang dilakukan ini bertujuan supaya pendidikan yang berlangsung di Indonesia berkembang secara merata dan berkualitas. Kita semua menghendaki bahwa pendidikan yang berkualitas dinikmati dan dirasakan oleh semua warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia sebagai "animal educandum" mempunyai hak untuk mendapat pendidikan atau harus dididik. Menurut Langeveld (2008), ada 4 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia sebagai makhluk yang berakal budi untuk mendapat pendidikan yaitu (1) Prinsip Potensialitas : Manusia memiliki potensi/kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang; (2) Prinsip Dinamika : manusia selalu aktif, dinamis, tidak statis; (3) Prinsip Individualitas : manusia yang memiliki keunikan dan kekhasan; (4) Prinsip Sosialitas : manusia selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Inilah sejumlah alasan rasional yang mengharuskan manusia untuk mendapat pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan yang merata dan berkualitas baik akan membentuk manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan yang luas dan memadai, sikap atau karakter yang terpuji dan keterampilan yang produktif untuk pengembangan diri sendiri dan kebaikan semua orang (bonum commune).

SIMPULAN

Kualitas pendidikan memang membutuhkan indikator tertentu sebagai alat ukur untuk melihat perkembangannya. Kita semua perlu

mengemakan terus tradisi kemajuan dalam dunia pendidikan. Semua komponen masyarakat bertanggungjawab untuk memajukan pendidikan dalam segala dimensinya. Berbagai masalah yang ada di dunia pendidikan, dalam berbagai ragam dan bentuknya memberi gambaran yang jelas tentang situasi pendidikan kita saat ini. Kita tidak boleh berpangku tangan, tetapi harus berjuang untuk mengentas realitas ketertinggalan ini. Negara dan aparaturnya, serta masyarakat dan orang-orang yang mempunyai hati untuk berperan secara langsung maupun tidak langsung di dunia pendidikan, ditantang untuk berkomitmen langsung meningkatkan kualitas Pendidikan Nasional di negeri ini. Kita mempunyai visi yang satu dan sama yakni menjadikan pendidikan di Indonesia semakin merata dan berkualitas. Perayaan Hardiknas kiranya mampu menggelorakan komitmen dan panggilan hati seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas.

Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

DAFTAR PUSTAKA

Harian Umum Flores Pos, 26 April 2017

<http://www.kompasiana.com/evaprianka>, di akses pada tanggal 3 Mei 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki>, di akses pada tanggal 2 Mei 2017

<https://kominfo.go.id/content/detail/9605/hardiknas-2017-percepat-pendidikan-yang-merata-dan-berkualitas>, di akses pada tanggal 8 Juni 2017

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/04/surat-edaran-mendikbud-pedoman-peringatan>, di akses pada tanggal 9 Juni 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat. 2011. Jakarta : Gramedia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 2017. Penguatan Pendidikan Karakter. Jakarta : Kemendikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. Pedoman Pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017. Jakarta : Kemendikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. Surat edaran nomor 21046/MPK/TU/2017 tentang pedoman peringatan Hardiknas 2017. Jakarta : Kemendikbud

Langeveld, M.J. 2008. Pedagogika Teoretis-Sistematis. (diedit oleh Y.Suyitno). Bandung : Fakultas